

***Collaborative Governance* dalam Penanganan Banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara**

Bima Ade Prayoga Setiawan*¹, Eka Yulyana², Lina Aryani³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: Masbima21@gmail.com , HP. 082141633183

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 23 Oktober 2021

Direvisi: 21 November 2021

Dipublikasikan: Desember 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5746176

Abstract:

This study discusses related to Collaborative Governance in flood management in Tanjungsari Village, North Cikarang District. This study uses a qualitative method with the type of case study research. Data collection techniques were carried out by triangulation which included interviews, documentation and observations. Using the Collaborative Governance theory of Ansel and Gash which resulted in the finding that the initial condition that caused flooding in Tanjungsari Village, North Cikarang District, was the accumulation of garbage in Ulu River. Bekasi Regency BPBD has not been optimal in holding the main control in facilitative leadership, institutional design is still hampered in terms of legality and the Collaboration Process is considered not optimal enough, this can be seen from the collaboration with the private sector and the community who still only go through the long-distance communication process, then for cooperation with the PUPR service, there are still obstacles such as still not being able to find the right option for flood management.

Keywords: *Collaborative Governance, Flood, Tanjungsari*

PENDAHULUAN

Dalam 10 tahun terakhir, bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, tanah longsor dan puting beliung) mendominasi kejadian bencana setiap tahunnya. Cuaca ekstrem dan perubahan kondisi lingkungan turut memicu

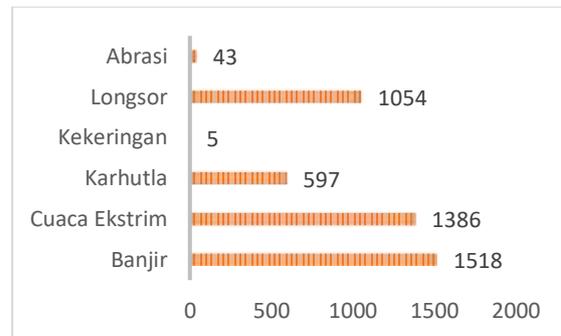
peningkatan bencana di negara kita Indonesia (Rikin, 2020)

Kedua faktor tersebut juga tidak terlepas dari aktivitas kehidupan manusia yang kerap tidak peduli terhadap kondisi dan daya dukung lingkungan. Bahaya alam (*natural hazards*) dan bahaya karena ulah manusia (*man-made hazards*) yang

menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR)* dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (*geological hazards*), bahaya hidrometeorologi (*hydrometeorological hazards*), bahaya biologi (*biological hazards*), bahaya teknologi (*technological hazards*) dan penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*) Kerentanan (*vulnerability*) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat (BNPB, 2021)

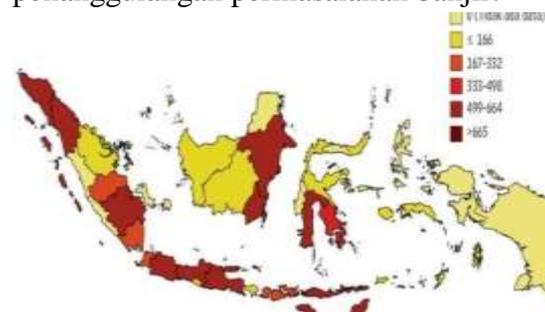
Dalam hal ini tentu saja terkait dengan kian maraknya bencana alam yang terjadi baik itu dari kesalahan manusia yang tidak menjaga alam ataupun memang murni karena gejala alam yang terjadi tetap membutuhkan perhatian lebih dalam penanggulangannya.

Berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan 98 persen kejadian bencana dipicu oleh faktor hidrometeorologi (Hakim, 2021). Adapun BNPB (Pusdatin BNPB, 2021) mencatat selama tahun 2020, telah terjadi setidaknya 4650 kasus bencana di Indonesia yang disebabkan oleh hidrometeorologi dengan perincian sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Statistik Gempa Bumi di Indonesia 2020

Salah satu bencana yang sering terjadi saat ini adalah bencana banjir. Banjir dapat terjadi menurut Kepala Departemen Kajian Kebijakan dan Pembelaan Hukum Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi dalam (Dewi, 2021) karena adanya dua penyebab yaitu faktor alam seperti curah hujan yang tinggi atau dikarenakan oleh kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan sehingga terjadi penyumbatan pada daerah-daerah aliran air. Selain itu banjir juga diakibatkan oleh kurangnya pembuatan kebijakan yang baik dalam upaya pengentasan dan penanggulangan permasalahan banjir.



Gambar 2. Peta Sebaran Banjir di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas pulau Jawa berpotensi besar terhadap banjir di Indonesia, dengan BNPB dalam (Indeks Ratio Bencana Indonesia, 2020) menempatkan provinsi Jawa Barat sebagai lokasi yang paling rentan terhadap fenomena banjir di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

dalam (CNN Indonesia, 2021) Provinsi Jawa barat terdapat tujuh kota / kabupaten yang terdampak banjir selama 2021. Daerah yang terdampak banjir di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Subang, Karawang, Bekasi, Cirebon, Bogor, Kota Depok dan Bekasi.

Tentu saja bencana banjir tersebut menimbulkan banyak sekali kerugian terhadap masyarakat baik dari segi materil ataupun moril. Oleh karena itu sangat perlu upaya yang baik dari pemerintah bersama seluruh elemen yang ada dalam memanggulangi permasalahan banjir tersebut. Hal ini dikarenakan apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang baik maka tentu saja permasalahan banjir akan terus bencana rutin disetiap tahunnya.

Dalam hal ini salah satu daerah yang sering mengalami permasalahan banjir adalah Kabupaten Bekasi, Bahkan banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi salah satu bencana banjir terbesar di Kabupaten Bekasi. Pada bulan febuari terjadi banjir di 17 kecamatan yang menyebabkan 40 desa terendam banjir dengan ketinggian 40cm – 1.5 m dalam hal ini Ketua pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa hal ini dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi serta meluapnya beberapa sungai diantara adalah sungai cijambe, kali sadam, Kali Bekasi, Kali Cibeet, Kali Cilemah Abang, dan sungai Citarum (Hayatullah, 2021).

Tabel 1 Daftar Banjir di Setiap Kecamatan di Kabupaten Bekasi tahun 2020

Data Banjir Kabupaten Bekasi		
No	Ketinggian	Lokasi
1	50-150 cm	Tambun Selatan
2	50-150 cm	Cibitung
3	50-150 cm	Setu Selatan
4	50-70 cm	Cikarang Selatan
5	50-150 cm	Cikarang Pusat

6	50-80 cm	Cibarusah
7	50-150 cm	Cikarang Utara
8	40-60 cm	Sukawangi
9	40cm	Muara Gebong
10	50-70 cm	Serang Baru
11	50-150 cm	Cikarang Timur
12	50- 100 cm	Ciakarang Barat
13	50-60 cm	Babelan
14	50-70 cm	Sukakarya
15	50-80 cm	Tambun Utara
16	80-150 cm	Kedung Waringin
17	80 cm	Pebayuran

Sumber: Bekasinews, 2021

Tentu permasalahan ini memerlukan perhatian agar kedepan permasalahan ini bisa diatasi sebab apabila hal ini tidak di tanggapi serius maka tentu saja akan terus merugikan dikemudian hari. Di dalam hal ini salah satu kecamatan yang sering terjadi banjir adalah di Kecamatan Cikarang Utara, hal itu dikarenakan sering meluapnya air Kali Ulu Daerah tersebut. Adapun beberapa desa yang terkena dampak dari bencana banjir di Cikarang Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Data Bnjir di Kecamatan Cikarang Utara

No	Nama Desa	Ketinggian
1	Tanjung Sari	2 meter
2	Karang Raharja	1-2 Meter
3	Pasir Gombang	1,5 Meter

Sumber: Antflix, 2021

Dalam hal ini bila mengacu pada data diatas penelitian ini mengambil kasus di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara, Dimana di daerah tersebut sering sekali terkena banjir dan terakhir terkena banjir pada bulan febuari 2021 (Jaenudin, 2021). Dalam menanggapi permasalahan ini tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja sebab permasalahan banjir merupakan sesuatu permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu perlu ada

koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak baik itu dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, pihak swasta dalam hal ini dari Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kabupaten Bekasi dan masyarakat agar permasalahan ini bisa diatasi atau setidaknya dampaknya bisa dikurangi.

Di Kabupaten Bekasi sendiri sejak 2017 sudah ada 14 Desa tanggap bencana yang ada dan dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Bekasi akan menambah sekitar 8 Desa tanggap bencana mengingat potensi bencana di Kabupaten Bekasi meningkat khususnya bencana banjir yang awalnya hanya di 21 titik kecamatan, sekarang sudah bertambah menjadi 23 titik kecamatan yang terkena dampak banjir. Di Kecamatan Cikarang Utara terdapat daerah tanggap bencana salah satunya adalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang utara.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah atau pemerintah daerah dalam pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan memberikan acuan pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh Bencana bagi aparatur pelaksana dan pemangku kepentingan dalam pengurangan resiko bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dengan mengurangi ancaman

bencana, kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Dalam hal ini penanganan bencana yang ada salah satunya adalah banjir Desa yang terjadi di desa tanjungsari yang dijadikan objek penelitian dengan fokus penelitian terkait *Collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir. *Collaborative governance* sendiri merupakan bentuk dari *governance* yang melibatkan banyak *stakeholder* atau pemangku kepentingan secara bersamaan dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah dalam pembuatan keputusan bersama (Ansel & Gash, 2007).

Di Kecamatan Cikarang Utara sendiri terdapat TAGANA (Taruna Siaga Bencana) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan dan membantu masyarakat ketika terjadi bencana dalam hal ini yang sering terjadi adalah banjir di daerah tersebut. Taruna Siaga Bencana sendiri selalu berupaya untuk bisa membantu masyarakat ketika bencana dengan mendirikan posko bencana dan menggalang dana serta bantuan untuk korban bencana banjir khususnya di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara.

Dalam menangani permasalahan banjir di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkolaborasi dengan pemerintah desa, kelompok siaga bencana/tim relawan penanggulangan bencana dalam hal ini ada dari pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kabupaten Karawang dan organisasi masyarakat seperti Taruna Tanggap Bencana Desa.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* dalam

menangani dan mengurangi resiko bencana banjir, diantaranya adalah upaya yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana yang berupaya untuk memberikan dorongan agar masyarakat lebih bisa tanggap terhadap bencana banjir yang ada dengan langkah-langkah antisipatif seperti mendorong menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terjaga, serta membuat simulasi penanganan bencana agar masyarakat tidak panik ketika bencana banjir datang.

Lalu ada BPBD yang berupaya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan pengurangan resiko bencana serta membantu memberikan bantuan ketika bencana banjir datang, dari pihak pemerintah desa yang berupaya membuat langkah strategis dalam penguatan kelembagaan dan kebijakan dalam penanganan banjir, dan dari pihak swasta seperti ACT melakukan upaya dengan memberikan bantuan baik secara moril dan materil. Serta peran masyarakat desa untuk bisa menyukseskan upaya yang ada dalam pengentasan bencana banjir ini.

Namun bila melihat dari fakta yang ada di lapangan peneliti menemukan fakta belum adanya komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menyediakan kebijakan terkait dengan langkah penanganan / upaya pencegahan banjir hal itu terlihat dari belum adanya Peraturan Desa yang mengatur terkait dengan penanggulangan bencana.

Namun dalam hal yang menjadi pertimbangan peneliti adalah kegiatan tanggap bencana yang ada di Desa Tanjung Sari sudah tercantum anggaran desa yaitu dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) milik Desa Tanjung Sari, dimana untuk penanganan bencana dana yang disiapkan adalah sebesar 390 juta. Dalam hal ini dana yang dimiliki tersebut digunakan untuk pelatihan mitigasi

bencana dan keperluan masyarakat ketika ada bencana berlangsung.

LANDASAN TEORI

Secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahas Inggris yaitu *co-labour* yang artinya bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna, 2008)

Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam (Harley & Bissman, 2010) kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Fendt (2010: 22) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:

1. Organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihaklain.
2. Dengan berkolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerjasendiri.
3. Dengan berkolaborasi, organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar

Paradigma *governance* merupakan paradigma baru yang dianut dan menjadi populer di beberapa negara di dunia. Pemahaman dari paradigma yakni *implementing agency* tidak hanya menjadi monopoli pemerintah. Pada tahun 1980-an paradigma ini mulai dirancang oleh Negara-negara Barat dengan tujuan untuk meminimalisir peran-peran negara dalam pembangunan dan mendelegasikannya kepada aktor lain.

Hal ini dikarenakan tumbuhnya kesadaran bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas dari segi anggaran, SDM, teknologi dan kapasitas manajemen untuk dapat memecahkan urusan publik sendiri. Era demokrasi juga menuntut pemerintah makin terbuka dan makin inklusif dalam memberikan ruang bagi *Civil Society Organizations* (CSOs) dan sektor swasta untuk dapat terlibat dalam implementasi suatu kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015)

Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah 'penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat (Dwiyanto, 2003). Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga *good governance*, dengan demikian, adalah mekanisme pengelolaan

sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama.

Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Ansell Dan Gash (2007) Berpandangan Ada 4 Tahapan Dalam Melaksanakan *Collaborative Governance*, Yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Dalam hal ini berkaitan dengan kondisi yang menyebabkan harus terjadinya proses kolaborasi baik itu antar individu, antar lembaga, atau antar instansi.

2. *Facilitative Leadership* (Fasilitas Kepemimpinan)

Adanya fasilitator yang mewadahi proses kolaborasi yang terjadi sehingga bisa tercipta suatu kerja sama dalam menangani permasalahan yang ada dalam kondisi awal tersebut.

3. *Institutional Design* (Desain Institusi)

Institutional design merupakan bagian dari hasil kerja sama tersebut bisa berupa jaminan kerja sama seperti lembaga atau kontrak kesepakatan atau Mou dalam proses kolaborasi tersebut

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Dalam hal ini mengacu pada proses kolaborasi yang dilakukan pada permasalahan yang terjadi oleh instansi terkait atau lembaga terkait yang bertugas memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam proses kolaborasi tersebut

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi yang menurut Sugiyono (2016) mencakup gabungan dari wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini diambil dengan cara *purposive*. Teknik *purposive* menurut Sugiyono (2016) merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. peneliti menentukan:

Tabel 3 Informan Penelitian

No	Informan
1	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bekasi
2	Kepala Bagian darurat dan Logistik
3	Kepala seksi Pemerintahan

4	Ketua Aksi Cepat Tanggap (ACT)
---	--------------------------------

5	Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara (Kelompok Kesiapsiagaan Bencana)
---	---

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Dalam penelitian ini, dasar pertimbangan tertentu dimaksudkan yaitu bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap profesional dalam lingkup pemerintah yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana salah satunya banjir di desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal

Dalam permasalahan banjir yang ada di setiap daerah tentu saja disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda, yang tentunya memerlukan penanganan yang berbeda pula. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian penanganan permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi dengan mengambil studi kasus dari Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap kompeten untuk bisa memberikan informasi terkait dengan proses *collaborative Governance* dalam penanganan banjir yang ada disana.

Terkait banjir yang terjadi di desa tanjung sari kecamatan cikarang utara ada dua faktor yang menyebabkan hal yang pertama adalah karena kecilnya daerah aliran sungai disana sedangkan daerah tersebut merupakan daerah pertemuan dua sungai yaitu kali cibeet dan kali ulu yang tentu saja hal itu membuat air mudah meluap ketika ada hujan dengan intensitas

yang cukup besar, lalu yang kedua banjir yang terjadi di daerah tersebut diakibatkan oleh daerah tanjung sari yang merupakan daerah yang rendah sehingga menyebabkan daerah itu mudah tergenang ketika musim penghujan tiba.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Berdasarkan Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan BNPB dibentuk menjadi tangan kanan pemerintah dalam penanggulangan bencana. pembentukan BNPB merupakan implementasi pasal 10 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya dalam prosesnya dibuat juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan penanggulangan bencana diseluruh Indonesia. Dalam hal bisa dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan proses-proses penanganan bencana yang ada di daerahnya. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan keleluasaan kepada pihak BPBD Kabupaten Bekasi

3. Desain Institusi

Desain institusi terhadap penanganan bencana yang ada di Kabupaten Bekasi akan lebih mengacu pada terbentuknya DESTANA (Desa Tangguh Bencana), Desa tangguh bencana sendiri di bentuk untuk membantu masyarakat mengenal dan menganalisis cara bertahan ketika suatu bencana atau musibah terjadi khususnya dalam hal ini di Kabupaten Bekasi.

Desa Tangguh Bencana dibuat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 1

Tahun 2012 dimana hal itu diharapkan mampu membuat suatu daerah atau desa yang bisa beradaptasi terhadap potensi-potensi bencana yang terjadi.

Desa tangguh Bencana Desa Tanjungsari memiliki peran yang cukup penting dalam proses-proses penanggulangan bencana yang ada di daerah tersebut. Terkait Desa Tangguh Bencana di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara senantiasa mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan selain itu mereka juga sering membuat acara terkait sosialisasi proses penanganan baik sebelum atau sesudah bencana terjadi.

Kepala Desa Tanjungsari juga menaruh anggaran yang cukup besar untuk program itu yaitu sebesar 300-400 juta pertahunnya. Tentu saja anggaran itu bisa sangat berguna untuk masyarakat ketika mereka mengalami bencana.

Namun yang membingungkan adalah belum adanya Peraturan desa yang mengatur terkait dengan adanya kerjasama antara pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BPBD Kabupaten Bekasi dengan pihak Desa Tanjungsari, Tetapi dalam hal ini Kepala Desa Tanjungsari berencana membuatnya namun menunggu contoh dari Peraturan Desa dari desa yang telah terlebih dahulu membuat Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Bekasi.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi yang terjadi berpusat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, dimana untuk koordinasi baik dengan pihak desa dan pihak swasta dipegang oleh BPBD Kabupaten Bekasi.

Dalam hal ini proses penanggulangan bencana khususnya banjir di Kota Bekasi sangat diupayakan sekali penanganannya oleh pihak BPBD Kabupaten Bekasi, terkait hal ini bisa dilihat mulai dari proses

kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD dan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS)

Dimana dalam proses kerja sama yang dilakukan oleh kedua instansi itu didapati fakta bahwa ada 2 hal yang ingin direncanakan untuk mengatasi permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. Berikut adalah 2 opsi yang dilakukan antara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai Kota Bekasi:

Pertama adalah rencana terkait relokasi masyarakat dimana diharapkan masyarakat di daerah tersebut bisa dipindahkan ke daerah yang lebih aman dari potensi terjadinya banjir khususnya bagi masyarakat yang ada di Desa Tanjungsari, dalam hal itu dikarenakan daerah tanjung sari merupakan daerah yang cukup rendah dan diapit oleh dua anak sungai yang menyebabkan daerah tersebut mudah terkena banjir khususnya dikala musim penghujan.

Namun terkait hal ini yang jadi permasalahan dalam hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar mengingat warga juga pasti tidak akan melepas harga rumah dan tanahnya dengan murah sehingga kemungkinan berdasarkan analisis penulis terkait hal ini akan sulit terelalisasi.

Kedua adalah pelebaran anak sungai sehingga memungkinkan aliran air yang lebih lancar sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir khususnya di daerah Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara, namun menurut penulis selain harus dilakukan pelebaran juga harus dilakukan pembersihan kembali di aliran anak sungai tersebut karena dari hasil observasi yang dilihat oleh penulis Kedua kali yang mengapit daerah tersebut

cenderung kotor dan banyak penumpukan sampah.

Dalam hal ini apabila pemikiran masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan bisa diperbaiki dan anak sungai di perbesar maka ada kemungkinan banjir bisa diatasi. Terkait penulis hal ini lebih relevan dibandingkan opsi yang pertama dikarenakan pembiayaan yang tidak terlalu besar dan dinilai lebih bisa dimaksimalkan.

BPBD sudah menyiapkan kerja sama dengan dinas lain namun belum bisa terlaksana dikarenakan adanya kendala terkait dengan opsi penanganan banjir di Desa Tanjungsari. Namun terkait kerja sama yang akan dilakukan oleh pihak BPBD akan dilakukan segera setelah opsi yang dibicarakan oleh pihak BBWS selesai ditentukan. Hal ini mengingat diperlukannya upaya untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Kondisi awal menyatakan bahwa Kali Ulu mengalami penumpukan sampah yang menyebabkan aliran airnya menjadi tersumbat, Dimana hal ini tentu membuat kali tersebut mudah meluap dan mampu menjadi salah satu penyebab adanya banjir di daerah tersebut ditambah kondisi tanah yang rendah menyebabkan mudah adanya genangan air.

kepemimpinan fasilitatif dinilai sudah cukup optimal meskipun terdapat kekurangan. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Bekasi juga memberikan keleluasaan kepada pihak BPBD Kabupaten Bekasi untuk menganalisis permasalahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi.

Desain istitusi dinilai masih belum optimal, hal ini dikarenakan terkait dengan proses pembuatan Destana meskipun sudah

berjalan masih memiliki Mou dimana ini bisa menjadikan kerjasama yang dilakukan tersebut masih memiliki masalah terkait dengan legalitas program serta terkendalanya bebrapa kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun swasta.

Proses Kolaborasi dinilai belum cukup optimal, hal ini bisa terlihat dari kerja sama dengan pihak BBWS yang masih hanya melawati proses komunikasi jarak jauh, lalu untuk kerja sama dengan dinas PUPR masih terdapat kendala seperti masih belum bisa mencari opsi yang tepat untuk penanganan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, C., & Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- BNPB. (2021, April 4). *Beranda/bencana alam*. Retrieved from Potensi Ancaman Bencana: <https://www.bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>
- BNPB, T. K. (2020). *Indeks Ratio Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- CNN Indonesia. (2021, Febuari 21). *CNN Indonesia>Home>Nasional>Peristiwa*. Retrieved from BPBD Jawa Barat Catat Tujuh Kabupaten/Kota Dilanda Banjir <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210221151518-20-609043/bpbd-jawa-barat-catat-tujuh-kabupaten-kota-dilanda-banjir>
- Dewi, B. K. (2021, Januari 19). *Kompas.com>Sains*. Retrieved from Deretan Bencana Alam di Awal 2021, Walhi Desak Pemerintah Serius Pulihkan Lingkungan: <https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/20/201943523/deretan-bencana-alam-di-awal-2021-walhi-desak-pemerintah-serius-pulihkan?page=all>
- Dwiyanto. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Frendt. (2014). *Introducing Electronic Suply Chain Collaboration In China*. Berlin : Univeritatsverlag der tecnichens unveristat berlin.
- Hakim, R. N. (2021, Januari 21). *Kompas.com>Nasional*. Retrieved from 5 Bencana Alam di Awal 2021, dari Longsor Sumedang hingga Gempa Sulbar: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/18/12393831/5-bencana-alam-di-awal-2021-dari-longsor-sumedang-hingga-gempa-sulbar?page=all>
- Harley, & Bissman. (2010). *An anatomy of collaboration within the Online Environment*. Heidelberg: Springer International Publishing.
- Hayatullah. (2021, Febuari 20). *Karawang Bekasi Ekspress>Daerah*. Retrieved from Luapan Enam Sungai Bikin 17 Kecamatan di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir:<https://karawangbekasi.jabar.ekspress.com/2021/02/20/luapan-enam-sungai-bikin-17-kecamatan-di-kabupaten-bekasi-terendam-banjir/>
- Islamy, S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama.
- Jaenudin, M. (2021, Febuari 7). *Atmago.com>Beritawarga>Cikarang Utara*. Retrieved from Kampung Kali Ulu Desa Tanjungsari

Kecamatan Cikarang Utara
Kembali Terendam Banjir:
https://www.atmago.com/berita-warga/kampung-kali-ulu-desa-tanjungsari-kecamatan-cikarang-utara-kembali-terendam-banjir_69272878-c105-46f5-9add-7ea991d86937

- Ndraha, T. (2016). *Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.
- Pusdatin BNPB. (2021, Januari 2). *Geoportal BNPB*. Retrieved from Bencana Indonesia 2020: <https://gis.bnpb.go.id/>
- Rikin, A. S. (2020, Desember 14). *Berita Saru>Nasional*. Retrieved from Dalam Setahun, Bencana Alam Telan 360 Korban Jiwa, 6 Juta Mengungsi: <https://www.beritasatu.com/nasional/709313/dalam-setahun-bencana-alam-telan-360-korban-jiwa-6-juta-mengungsi>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wanna. (2008). *Collaborative Governance: Meanings, Dimensions Driver And Outcomes*. Canberra: Australian University E-Press.